

Mekanisme Survival Buruh Harian Penebang Kayu di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara

Novri Amdani Saragih^{1*}, Saputra Adiwijaya², Ida Bagus Suryanatha³

¹ Universitas Palangka Raya, Indonesia

Received: 06/04/2026	Revised: 10/06/2026	Accepted: 28/07/2026
Abstract	This study analyzes the survival mechanisms of daily wage timber-cutting laborers in Muara Pari Village, Lahei District, Barito Utara Regency, an indigenous Dayak Taboyan community whose livelihood has shifted from agrarian subsistence toward extractive sector labor as mining, plantation, and timber concessions encircle the village amid fluctuating rubber prices, situating the study within rural economic precarity under extractive-industry expansion. The study aims to analyze the survival mechanisms laborers employ to manage this vulnerability. Using a descriptive qualitative approach with in-depth interviews and secondary data, the study applies James C. Scott's moral economy and safety first framework. Findings show village households form three income clusters, with timber-cutting laborers positioned in an informal extractive cluster between formal industry wages and subsistence farming; among laborer households, spousal labor support further differentiates joint husband-wife, dual-separate, and single-earner configurations, the last being most vulnerable to falling below the subsistence line. Laborers manage this vulnerability through belt-tightening, dual-livelihood diversification, and social networks via the Handep tradition and patron client relations. Strong social capital and village policy opening access to former rubber-plantation land remain the main pillars keeping laborers above the subsistence crisis line, affirming the continued relevance of Scott's peasant subsistence logic today.	
Keywords	moral economy; Muara Pari; precarity; survival mechanism; timber-cutting laborers	
Corresponding Author: Novri Amdani Saragih Universitas Palangka Raya, Indonesia; amdanisaragih182@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan tidak lepas dari cara sumber daya alam dikuasai dan didistribusikan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup padanya. Secara ideal, kekayaan hutan dan lahan yang melimpah di wilayah pedesaan semestinya menjadi modal utama kesejahteraan warga; namun pada kenyataannya, ketimpangan penguasaan sumber daya tersebut justru melahirkan kelompok pekerja marginal yang terus berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Sektor kehutanan Indonesia tetap menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat pedesaan, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan prekariat kerja, yaitu pekerjaan tanpa kepastian upah maupun jaminan sosial



formal (Nur Adhi et al., 2023). Kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dan kondisi riil warga yang justru rentan secara ekonomi inilah yang menjadi persoalan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini.

Persoalan tersebut tampak nyata di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebuah desa masyarakat adat Dayak Taboyan yang terletak di pertemuan aliran Sungai Pari dan Sungai Lahei, anak Sungai Barito. Merujuk pada kurun waktu kurang lebih satu dekade lalu, tahun 2014-2016, Desa Muara Pari yang saat itu berpenduduk sekitar 550 jiwa masih memiliki struktur mata pencaharian yang jauh lebih agraris-subsisten: warga konsisten berladang padi gunung sebagai cadangan pangan utama sekaligus tradisi turun-temurun (Handep), menyadap karet sebagai komoditas tunai utama, serta memanen rotan sebagai hasil hutan tambahan, sementara sungai turut menjadi sumber pangan harian melalui perikanan tangkap skala kecil. Menebang kayu pada masa itu belum menjadi mata pencaharian utama, sebab kawasan hutan di sekitar desa masih berstatus hutan negara yang sebagian dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sementara usulan Hutan Adat Temenggung Sulur Hungei Parau Leu Muara Pari, seluas 2.394,58 hektare yang baru dirintis sejak 2012 pun belum kunjung mendapat kepastian hukum. Titik balik penting terjadi ketika harga karet yang sempat di atas Rp15.000,00 per kg anjlok tajam pada 2015-2016 ke kisaran Rp4.000,00-Rp6.500,00 per kg, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penguatan moratorium hutan (Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memperketat ancaman kriminalisasi atas pemanfaatan hutan oleh warga tanpa izin formal. Kombinasi guncangan harga dan penyempitan ruang legal inilah yang diduga menjadi pemicu awal pola diversifikasi pekerjaan, termasuk merambah ke penebangan kayu, yang bertahan hingga kini.

Kondisi tersebut kian mendesak untuk diteliti ketika melihat situasi terkini. Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Utara (2024), Desa Muara Pari kini berpenduduk 689 jiwa dengan struktur mata pencaharian yang telah bergeser jauh dari basis agraris-subsisten menuju sektor ekstraktif, yaitu buruh tambang, buruh sawit, hingga buruh harian penebang dan pengepul kayu, sejalan dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2026 (Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2021) yang mencatat transisi ini sebagai dampak ekspansi konsesi lahan industri di wilayah kecamatan. Desa kini betul-betul terkepung sejumlah izin usaha berskala besar, mulai dari konsesi tambang, izin pinjam pakai kawasan hutan, blok konsesi migas, konsesi kayu, hingga eks-perkebunan karet yang telah berpindah tangan ke perusahaan lain. Secara spesifik, kawasan hutan di sekitar Desa Muara Pari saat ini berstatus Hutan Produksi yang dibebani sejumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), antara lain PT Barito Putera (SK.484/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018) dan PT Austral Byna (SK.557/Menhut-II/09 jo. SK.917/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021), yang wilayah kerjanya

mencakup Kelompok Hutan Sei Lahei dan sejumlah kawasan lain di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2023). Sementara itu, Hutan Adat yang sebelumnya diusulkan-pun hingga kini belum membuahkan kepastian hukum, sehingga akses warga terhadap hutan tetap berada pada posisi rentan secara legal. Sebagai buruh harian penebang kayu, warga menghadapi risiko fisik yang mengancam nyawa dengan kompensasi yang sering hanya cukup untuk kebutuhan harian, ditambah tekanan jalan darat sepanjang 17 km menuju desa yang kerap rusak parah saat hujan sehingga menaikkan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Mekanisme survival di sektor informal ini pada praktiknya terwujud melalui pola nafkah ganda serta keterikatan pada relasi patron-klien dengan pengepul kayu untuk memperoleh pinjaman darurat, terutama saat harga karet anjlok di bawah Rp7.000,00 per kg, kondisi yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu ekonomi rumah tangga semata, melainkan menyangkut hajat hidup dan keselamatan fisik warga yang mendesak untuk segera dipahami secara ilmiah agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh persoalan kerentanan ekonomi masyarakat di kawasan sumber daya alam dari sudut yang berbeda-beda. Nur Adhi et al. (2023) mengkaji kondisi pekerja prekariat di kawasan industri Kota Makassar dan menemukan bahwa fleksibilitas kerja kontrak dan alih daya menempatkan buruh pada ketidakstabilan pendapatan tanpa jaminan sosial yang memadai. Purwanto dan Mahadika (2021) menyoroti bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, alih-alih mengentaskan kemiskinan, justru menciptakan kerentanan ekonomi baru bagi warga sekitar akibat ketergantungan pada satu komoditas dan menyempitnya akses terhadap sumber daya hutan. Sementara itu, Kusuma et al. (2025) mengevaluasi kegagalan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam menggerakkan sistem nafkah pedesaan, dan menemukan bahwa modal sosial asli komunitas justru lebih menentukan strategi bertahan hidup warga dibandingkan modal sosial bentukan yang diintervensi dari luar. Studi survival lain, seperti strategi bertahan hidup buruh nelayan tradisional pada musim paceklik (Afridania et al., 2022) dan mekanisme survival petani buah naga (Febrianti et al., 2024), turut memperkuat relevansi kerangka ekonomi-moral dan prinsip *safety first* James C. Scott (1976) sebagai pisau analisis untuk membaca perilaku ekonomi kelompok marginal pedesaan.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori mekanisme survival James C. Scott (1976), yang menjelaskan bahwa petani dan buruh pedesaan menjalankan tindakan ekonomi berdasarkan norma subsistensi, yaitu mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di atas pengejaran keuntungan, serta menjunjung resiprositas antarwarga guna menjaga kelangsungan hidup bersama, konsep yang dikenal sebagai "ekonomi moral" (*moral economy*). Dalam kerangka ini, buruh dipandang mengutamakan prinsip "mendahulukan selamat" (*safety first*) ketimbang mengejar keuntungan besar berisiko tinggi, sebab kegagalan ekonomi bagi mereka bukan sekadar kerugian

materi, melainkan ancaman langsung terhadap eksistensi fisik keluarga. Gagasan ini diperkuat pandangan Polanyi (1944) bahwa aktivitas ekonomi senantiasa melekat (*embedded*) dalam relasi sosial, serta Sen (1981) yang menegaskan bahwa kerentanan terhadap kelaparan lebih ditentukan oleh akses (*entitlement*) ketimbang ketersediaan pangan semata. Berdasarkan kerangka tersebut, Scott (1976) mengidentifikasi tiga strategi bertahan hidup petani dan buruh pedesaan: (1) mengencangkan sabuk pengaman (*belt-tightening*), yaitu penghematan yang dipaksakan keadaan; (2) alternatif subsistensi (*subsistence alternatives*), yaitu diversifikasi pekerjaan atau pola nafkah ganda (*occupational multiplicity*), yang menurut Susanti dan Izana (2021) merupakan strategi paling lazim ditempuh rumah tangga pedesaan di negara berkembang; dan (3) pemanfaatan jaringan sosial (*social networking*), yaitu modal sosial (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 2000) yang bekerja baik secara horizontal antar buruh maupun vertikal melalui relasi patron-klien dengan pengepul, sebagaimana ditemukan Afridania et al. (2022) berperan sebagai asuransi informal saat kondisi ekonomi sulit. Ketiga strategi inilah yang menjadi kerangka pemetaan utama dalam penelitian ini.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menyasar kelompok pekerja lain, seperti buruh kontrak industri kota, petani sawit, petani buah naga, atau nelayan tradisional, maupun berfokus pada evaluasi program kelembagaan formal seperti PHBM. Kajian yang secara spesifik menyoroti mekanisme survival buruh harian penebang kayu, sebagai kelompok pekerja yang justru lahir dari kegagalan sektor pertanian dan perkebunan rakyat akibat kepungan konsesi ekstraktif berskala besar, masih sangat terbatas, terlebih pada masyarakat adat yang wilayah kelolanya belum mendapat pengakuan hukum formal seperti di Desa Muara Pari. Kekosongan inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini: alih-alih mengevaluasi efektivitas program formal dari luar, penelitian ini berangkat dari sudut pandang aktor itu sendiri, yaitu buruh harian penebang kayu, untuk memahami bagaimana mereka secara mandiri menyusun strategi bertahan hidup, baik aktif maupun pasif, di tengah kepungan ekonomi ekstraktif yang menyempitkan ruang kelola mereka atas sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk mekanisme survival buruh harian penebang kayu di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, dengan memetakan strategi mengencangkan sabuk pengaman, diversifikasi nafkah ganda, dan pemanfaatan jaringan sosial yang mereka jalankan berdasarkan prinsip ekonomi-moral dan *safety first* James C. Scott (1976), guna memberikan kontribusi empiris bagi kajian sosial ekonomi pedesaan mengenai cara aktor marginal mengelola kerentanan di tengah kepungan ekonomi ekstraktif. Temuan penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial dan kebijakan lokal desa menjadi pilar utama yang menjaga buruh tetap berada di atas ambang batas subsistensi, di tengah keterbatasan akses modal alam akibat perusahaan yang semakin mendominasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk membedah mekanisme survival buruh harian penebang kayu di Desa Muara Pari, sebab metode kualitatif relevan untuk mengeksplorasi strategi bertahan hidup masyarakat marginal melalui gambaran mendalam atas fenomena sosial di akar rumput (Afridania et al., 2022).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 30 informan yang dipilih secara purposive, yakni 11 buruh harian penebang kayu, 4 perangkat desa, serta 15 masyarakat umum. Penentuan informan didasarkan pada kriteria berikut: (1) buruh harian penebang kayu dipilih dengan syarat aktif menebang kayu dalam satu tahun terakhir, berdomisili tetap di Desa Muara Pari, serta mewakili variasi usia dan pola nafkah, termasuk buruh yang merangkap sebagai penyadap karet maupun pekerja perempuan yang turut mendampingi suami di hutan, guna menangkap keragaman pola diversifikasi pekerjaan; (2) perangkat desa dipilih dari unsur pemerintahan desa yang aktif menjabat dan memahami kebijakan lokal terkait pengelolaan Dana Desa, BUMDes, serta akses lahan eks-perkebunan karet, agar mampu menjelaskan sisi kebijakan dan sejarah transisi mata pencaharian desa; dan (3) masyarakat umum dipilih dari kelompok yang berinteraksi langsung dengan dinamika ekonomi buruh penebang kayu, meliputi keluarga atau istri buruh, pengepul atau pedagang lokal, tokoh adat (Mantir/Demang), serta pemuda desa yang melakukan migrasi ekonomi sirkuler, dengan syarat telah berdomisili di desa minimal lima tahun agar memahami perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Wawancara terhadap ketiga kelompok informan ini difokuskan untuk memetakan strategi aktif dan pasif buruh, mulai dari pengaturan konsumsi rumah tangga hingga pemanfaatan jaringan sosial untuk hutang-piutang kepada pengepul selaku patron.

Sebagai data sekunder, penelitian ini menerapkan studi pustaka atas data laporan desa, data BPS Kabupaten Barito Utara (2024, 2025), serta RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2026 (Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2021) untuk memotret transisi mata pencaharian dan struktur agraria wilayah penelitian, yang kemudian disintesis dengan literatur teori mekanisme survival James C. Scott. Seluruh data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu menyilangkan hasil wawancara mendalam dengan observasi langsung kondisi rumah tangga informan serta data sekunder desa. Triangulasi ini penting untuk membedakan keluhan yang bersifat situasional atau berlebihan dengan masalah struktural yang benar-benar dialami informan, misalnya dengan mencocokkan pernyataan informan mengenai kesulitan ekonomi dengan kondisi aset fisik yang teramati di lapangan, atau menelusuri pola historis suatu persoalan untuk memastikan apakah persoalan tersebut memang berkaitan dengan tekanan ekonomi ekstraktif atau merupakan kondisi

musiman yang sudah berlangsung sejak lama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa Desa Muara Pari berada dalam kondisi "geografis paradoks", dimana kekayaan sumber daya alam yang melimpah berbanding terbalik dengan kerentanan ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan data demografi 2024, desa ini dihuni 689 jiwa (373 laki-laki, 316 perempuan), mayoritas Dayak Taboyan (Tawoyan), menetap di sepanjang Sungai Pari dan Sungai Lahei yang secara historis menjadi urat nadi transportasi dan ekonomi, namun kini terhimpit ekspansi industri ekstraktif berskala besar. Analisis profil kehidupan mengacu pada kerangka kehidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework*, Chambers & Conway, 1992; Scoones, 1998; DFID, 1999): kehidupan rumah tangga merupakan hasil interaksi lima aset modal, termasuk modal alam, manusia, sosial, fisik, dan finansial.

3.1. Lima Aset Modal Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Desa Muara Pari

Mengacu pada kerangka kehidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework*), kehidupan masyarakat Desa Muara Pari dibentuk oleh interaksi lima modal utama, yaitu modal alam, modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal finansial. Kelima modal ini saling berkaitan dan saling mengunci satu sama lain: kekayaan yang tampak melimpah pada satu modal tidak jarang justru sulit diakses dan sulit dikonversi menjadi kesejahteraan nyata, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Modal Alam. Sejalan dengan apa yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, Desa Muara Pari sesungguhnya dikelilingi hutan produktif dan lahan agraris yang subur, tetapi sebagian besar wilayahnya kini telah masuk ke dalam kawasan konsesi tambang batubara milik PT Samining dan PT Nusa Persada Resources (PT NPR), termasuk area yang berstatus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kepungan ini diperberat oleh keberadaan blok migas Medco Energi, konsesi kayu PT Austral Byna, hingga bekas perkebunan karet PT Mitra Barito Gemilang yang kini beralih kelola ke PT Eka Dura Perdana (Pemerintah Desa Muara Pari, 2026), sehingga hutan yang tersisa bagi warga hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kayu rimba campuran dan rotan. Sejak 2012, masyarakat adat setempat masih terus memperjuangkan pengakuan atas Hutan Adat Temenggung Sulur Hungei Parau Leu Muara Pari seluas kurang lebih 2.394,58 hektar sebagai modal alam terakhir yang tersisa, namun perjuangan ini belum membuahkan hasil hingga sekarang. Kondisi ini menggambarkan sebuah paradoks: modal alam melimpah secara fisik, tetapi terbatas secara akses, sehingga tidak serta-merta terkonversi menjadi kesejahteraan warga (Purwanto & Mahadika, 2021).

Tabel 1. Potensi Hutan dan Hasil Hutan Desa Muara Pari

Jenis Sumber Daya		Pemanfaatan Utama	Kendala Akses
Kayu	Rimba	Bahan baku utama	Regulasi konsesi dan izin lahan
Campuran		penebangan	
Rotan		Komoditas sampingan	Harga pasar rendah dan sulit akses
Lahan Eks-Karet		Ladang padi gunung	Keterbatasan akses akibat tumpang tindih perizinan lahan
Hasil Sungai (Ikan)		Konsumsi harian & dijual	Risiko pencemaran akibat tambang

Sumber: Pemerintah Desa Muara Pari (2026), diolah peneliti.

Modal Manusia. Kualitas modal manusia di Desa Muara Pari masih menghadapi banyak tantangan. Fasilitas pendidikan di desa memang tersedia, namun hanya sebatas TK dan SD; untuk melanjutkan ke jenjang menengah, anak-anak desa harus menempuh perjalanan jauh ke Lahei atau bahkan Muara Teweh. Layanan kesehatan pun serupa, Poskesdes yang seharusnya menjadi andalan warga sering kali tidak beroperasi optimal karena tenaga kesehatannya jarang berada di tempat. Persoalan sanitasi dan air bersih juga belum sepenuhnya teratasi: warga RT 01 masih bergantung pada Sungai Lahei/Inu, warga RT 02 dan RT 03 mengandalkan Sungai Pari, sementara sumur bor peninggalan BUMDes hanya dimanfaatkan segelintir rumah tangga saja, sehingga mayoritas warga tetap menggunakan air sungai yang berisiko tercemar oleh aktivitas industri di sekitarnya.

Modal Sosial. Di tengah keterbatasan modal alam dan modal manusia tersebut, modal sosial justru tampil sebagai modalitas paling kuat yang menopang mekanisme survival warga. Berdasarkan temuan lapangan, tradisi Handep atau gotong royong di desa Muara Pari tetap hidup sebagai jaring pengaman non-formal, sementara kepercayaan warga terhadap lembaga adat seperti Mantir dan Demang jauh lebih kuat dibandingkan kepercayaan pada jalur hukum formal dalam menyelesaikan perselisihan. Modal sosial ini bekerja layaknya sistem asuransi komunitas, dimana ketika satu keluarga mengalami gagal panen atau paceklik, bantuan logistik dari kerabat dan tetangga datang hampir secara otomatis tanpa pamrih, menegaskan bahwa di tengah lemahnya jaminan sosial formal, justru ikatan komunitaslah yang menjadi penopang utama ketahanan warga.

Modal Fisik. Dari sisi modal fisik, kesenjangan infrastruktur desa terlihat cukup tajam. Jalan di dalam permukiman memang sudah 100 persen dikeraskan dengan cor semen, tetapi jalan akses utama sepanjang 17 kilometer menuju desa masih berupa tanah merah yang hancur dan berlumpur saat musim hujan, sehingga perjalanan bisa memakan waktu hampir dua jam dan turut menaikkan biaya logistik serta menekan nilai jual komoditas warga. Persoalan ini semakin berlarut karena sebagian ruas jalan tersebut masuk ke dalam area konsesi eks-perkebunan karet yang kini dikuasai PT Eka Dura Perdana, sehingga ruang gerak pemerintah desa untuk melakukan perbaikan menjadi terbatas (Pemerintah Desa Muara Pari, 2026).

Modal Finansial. Kondisi infrastruktur yang timpang ini pada akhirnya berimbas langsung pada modal finansial rumah tangga, yang juga sangat tidak merata. Rumah tangga yang anggotanya bekerja sebagai karyawan perusahaan bisa memperoleh pendapatan stabil antara Rp4.000.000,00 hingga Rp6.000.000,00 per bulan, bahkan mencapai Rp10.000.000,00 bagi posisi senior seperti humas; sementara rumah tangga petani hanya berpendapatan fluktuatif Rp2.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00 per bulan dan bisa anjlok drastis saat harga karet jatuh, sehingga satu keluarga lazim harus menjalankan dua hingga empat jenis pekerjaan sekaligus demi bertahan hidup (Pemerintah Desa Muara Pari, 2026). Akses terhadap permodalan formal pun nyaris tertutup, sebab sebagian besar lahan warga hanya berstatus Surat Keterangan Tanah (SKT) desa yang tidak bisa dijadikan agunan bank, sehingga warga pada akhirnya mengandalkan sistem ijon dari pengepul. Untuk menjaga ketahanan finansialnya, warga lebih mengandalkan tabungan emas, ternak ayam, aset kebun karet atau sawit, remitansi melalui Agen BRILink, serta berbagai bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, PKH, BPNT, dan subsidi pupuk.

Kelima modal penghidupan ini pada akhirnya saling mengunci satu sama lain: keterbatasan pada satu modal memaksa warga bertumpu lebih berat pada modal yang lain, dan pada titik itulah mekanisme survival buruh harian penebang kayu, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut, menemukan konteksnya yang paling mendasar.

3.2. *Klaster Pendapatan Rumah Tangga dan Posisi Buruh Penebang Kayu di Desa Muara Pari*

Berlandaskan berbagai modal yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya sejalan dengan hasil pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Berdasarkan data profil desa dan data primer penelitian (Pemerintah Desa Muara Pari, 2026) yang disandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Barito Utara tahun 2026 dan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025), rumah tangga di Desa Muara Pari dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster pendapatan sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Klaster Pendapatan Rumah Tangga dan Posisi Buruh Penebang Kayu di Desa Muara Pari

Klaster	Sumber Pendapatan Utama	Kisaran Pendapatan	Karakteristik
Klaster 1 Formal/Industri	Karyawan tetap/kontrak di perusahaan tambang, migas, atau perkebunan sekitar desa	Rp4.000.000,00- Rp10.000.000,00/bulan (mengacu UMK Barito Utara 2026 sebesar Rp4.093.071,00 sebagai batas bawah)	Pendapatan tetap dan terjadwal bulanan disertai jaminan sosial formal; jumlah warga desa yang terserap masih terbatas dan didominasi posisi non-manajerial
Klaster 2 Ekstraktif Informal (Buruh	Buruh harian penebang/penggesek kayu, dibayar per siklus kerja dan volume kayu	±Rp2.775.000,00 per siklus kerja (2 kubik, 3-7 hari di hutan); setara ±Rp2.500.000,00-	Pendapatan tunai relatif besar per transaksi namun tidak reguler, sangat bergantung cuaca dan akses kayu, menanggung risiko

Penebang Kayu)	(kubik),	bukan	gaji	Rp3.500.000,00	jika	fisik tinggi, serta terikat pinjaman modal/BBM ke pengepul
Klaster Subsisten (Petani Karet, Peladang & Nelayan Sungai)	3	Penyadap karet, peladang padi gunung, dan nelayan sungai	Karet Rp7.000,00- Rp9.000,00/kg (fluktuatif, dapat 0% saat musim hujan); hasil ladang dan ikan sebagian besar dikonsumsi sendiri			Pendapatan tunai paling rendah dan tidak menentu di antara ketiga klaster, namun ditopang ketahanan pangan yang kuat; klaster ini paling sering bergeser sementara menjadi Klaster 2

Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2026 dan data BPS Kabupaten Barito Utara (2024, 2025)

Klaster 1 merepresentasikan segelintir rumah tangga yang berhasil masuk ke sektor formal sebagai karyawan perusahaan tambang, migas, atau perkebunan di sekitar desa. Rumah tangga ini memperoleh pendapatan bulanan tetap sebesar Rp4.000.000,00 hingga Rp6.000.000,00, bahkan dapat mencapai Rp8.000.000,00-Rp10.000.000,00 untuk posisi senior seperti humas perusahaan (data primer penelitian, 2026), jauh diatas Upah Minimum Kabupaten Barito Utara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4.093.071,00. Meski demikian, posisi teknis dan manajerial di perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak diisi pekerja dari luar daerah karena kualifikasi pendidikan formal warga desa yang masih terbatas, sehingga warga Desa Muara Pari pada umumnya hanya terserap sebagai buruh harian, tenaga keamanan, atau pengemudi (data primer penelitian, 2026).

Klaster 2 adalah posisi struktural buruh harian penebang kayu yang menjadi fokus penelitian ini. Berbeda dengan Klaster 1 yang menerima gaji bulanan tetap, buruh penebang kayu dibayar berdasarkan volume kayu yang berhasil digesek keluar dari hutan, dengan harga jual kayu ulin sebesar Rp3.800.000,00 per kubik, kayu balau/bengkirai Rp2.000.000,00 per kubik, dan kayu meranti Rp1.300.000,00 per kubik (data primer lapangan, 2026). Dalam satu siklus kerja yang membutuhkan waktu tiga hingga tujuh hari bermalam di hutan untuk menghasilkan dua kubik kayu ulin, buruh memperoleh pendapatan kotor Rp7.600.000,00, namun setelah dipotong biaya modal usaha seperti bahan bakar, oli, dan perawatan chainsaw sebesar Rp4.825.000,00, keuntungan bersih yang diterima hanya sekitar Rp2.775.000,00 (data primer lapangan, 2026), sebagaimana telah dirinci pada Tabel 2. Jika dirata-ratakan per bulan, angka ini setara dengan kisaran Rp2.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00, hampir menyamai pendapatan petani karet pada kondisi normal, namun dengan risiko fisik yang jauh lebih tinggi dan tanpa kepastian jadwal kerja.

Klaster 3 mencakup rumah tangga yang bertumpu pada penyadapan karet, perladangan padi gunung, dan perikanan sungai sebagai sumber nafkah utama. Harga karet di tingkat petani berkisar Rp7.000,00 hingga Rp9.000,00 per kilogram pada kondisi normal, tetapi dapat merosot hingga pendapatan 0% ketika musim hujan tiba karena getah tidak dapat disadap dalam kondisi basah (data primer lapangan, 2026). Hasil ladang padi gunung dan tangkapan ikan sungai pun sebagian besar tidak

dijual, melainkan dikonsumsi sendiri sebagai cadangan pangan keluarga, sehingga klaster ini memiliki pendapatan tunai paling rendah di antara ketiga klaster meski ketahanan pangannya relatif kuat. Sebagai pembanding, garis kemiskinan pedesaan Provinsi Kalimantan Tengah pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp613.490,00 per kapita per bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga di Desa Muara Pari berkisar empat hingga lima jiwa, ambang batas kemiskinan rumah tangga berada di kisaran Rp2.450.000,00 hingga Rp3.070.000,00 per bulan, angka yang berdekatan dengan batas bawah pendapatan Klaster 2 dan 3. Posisi inilah yang menjelaskan mengapa Klaster 3 paling sering bergeser sementara menjadi Klaster 2 setiap kali harga karet anjlok di bawah Rp7.000,00 per kilogram atau musim hujan tiba: penebangan kayu menjadi jalan pintas untuk memperoleh uang tunai dalam jumlah besar secara cepat, sekaligus menjaga rumah tangga tidak jatuh di bawah ambang batas subsistensi minimum sebagaimana dimaksud dalam prinsip *safety first* Scott (1976).

3.3. Dialektika Tiga Strategi Mekanisme Survival James C. Scott

Tiga strategi mekanisme survival Scott sebagaimana diuraikan di atas pada praktiknya tidak dijalankan secara seragam oleh seluruh buruh harian penebang kayu di Desa Muara Pari. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 11 informan buruh harian penebang kayu, ditemukan bahwa konfigurasi rumah tangga masing-masing informan turut menentukan besaran pendapatan yang diperoleh serta jenis kebutuhan yang menjadi prioritas, terutama terkait ada tidaknya dukungan tenaga kerja dari pasangan (istri) dalam aktivitas penebangan di hutan. Berdasarkan pola tersebut, kesebelas informan dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster pendapatan sebagaimana dirinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Klaster Pendapatan dan Konfigurasi Rumah Tangga Buruh Harian Penebang Kayu di Desa Muara Pari

Klaster	Konfigurasi Rumah Tangga	Estimasi Pendapatan	Karakteristik Kebutuhan & Strategi Survival
Klaster I Nafkah Kolektif Suami-Istri	Istri ikut mendampingi suami ke hutan (menyiapkan logistik, membantu proses penggesekan ringan)	≥Rp2.775.000,00 per siklus kerja, cenderung di batas atas karena tenaga kerja gabungan	Kebutuhan sekolah anak dan cicilan kendaraan relatif lebih terjangkau karena ada dua sumber tenaga dalam satu unit usaha; beban kerja fisik istri bertambah namun pengeluaran rumah tangga lebih terkendali
Klaster II Nafkah Ganda Terpisah	Suami menebang kayu berkelompok dengan buruh lain; istri menjalankan usaha terpisah di desa (menyadap karet, berladang, mencari rotan, atau berdagang kecil)	±Rp2.500.000,00-Rp3.500.000,00 per bulan dari suami, ditambah kontribusi tambahan istri yang bervariasi	Pengeluaran rumah tangga terbagi ke dua pos pendapatan sehingga risiko lebih tersebar, namun beban kerja domestik dan ekonomi istri berlipat ganda; kebutuhan rumah dan sekolah anak dipenuhi bertahap dari dua sumber

Klaster Nafkah Tunggal Tanpa Pendamping	III	Buruh bekerja sendiri tanpa dukungan tenaga kerja langsung dari pasangan (lajang, berstatus cerai, atau istri sepenuhnya di ranah domestik)	Paling rentan turun di bawah Rp2.500.000,00 per bulan, terutama saat musim hujan atau hasil tebangannya menurun	Seluruh beban nafkah bertumpu pada satu individu; paling bergantung pada relasi patron-klien dengan pengepul untuk pinjaman darurat; kebutuhan sekolah anak dan perbaikan rumah lebih sering tertunda
---	-----	---	---	---

Sumber: Data primer wawancara mendalam dengan buruh harian penebang kayu Desa Muara Pari, 2026.

Klaster I mencerminkan strategi "pemanfaatan jaringan sosial" Scott (1976) yang beroperasi di level internal rumah tangga, dimana istri tidak hanya berperan domestik, tetapi turut menjadi tenaga kerja tambahan dalam unit usaha penebangan kayu suaminya. Kombinasi tenaga kerja ini memungkinkan siklus kerja berjalan lebih efisien, sehingga pendapatan per siklus cenderung berada di batas atas kisaran Rp2.775.000,00, dan kebutuhan rumah tangga yang menuntut biaya tetap seperti sekolah anak atau cicilan kendaraan relatif lebih dapat terpenuhi. Namun demikian, pola ini juga menandakan beban kerja ganda yang ditanggung istri, baik sebagai pekerja hutan maupun pengelola kebutuhan domestik.

Klaster II merupakan wujud paling jelas dari strategi "alternatif subsistensi" atau pola nafkah ganda (*occupational multiplicity*) yang dikemukakan Scott (1976): suami dan istri sama-sama bekerja, tetapi pada sektor yang berbeda dan tidak saling bergantung secara langsung. Ketika pendapatan suami dari penebangan kayu tertekan akibat cuaca atau menurunnya hasil tebangannya, kontribusi istri dari menyadap karet, berladang, atau berdagang kecil berfungsi sebagai jaring pengaman tambahan. Diversifikasi sumber pendapatan pada klaster ini membuat total pendapatan rumah tangga relatif lebih stabil dibandingkan klaster lain, meskipun harus dibayar dengan bertambahnya beban kerja istri pada dua ranah sekaligus, domestik dan ekonomi.

Klaster III adalah kelompok paling rentan karena seluruh beban nafkah bertumpu pada satu individu tanpa dukungan tenaga kerja tambahan dari pasangan, baik karena berstatus lajang, cerai, maupun karena istri sepenuhnya berperan domestik tanpa kegiatan ekonomi tambahan. Kelompok ini paling mengandalkan strategi "mengencangkan sabuk pengaman" (*belt-tightening*) sebagai respons utama saat pendapatan tertekan, sekaligus paling bergantung pada relasi patron-klien dengan pengepul kayu untuk memperoleh pinjaman darurat ketika kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah anak atau perbaikan rumah tidak dapat ditunda. Tanpa jaring pengaman tambahan dari pasangan, buruh pada klaster ini berada pada posisi paling dekat dengan ambang batas subsistensi minimum (*subsistence crisis line*) yang dimaksud Scott (1976).

3.4. Kajian Teori James C. Scott dalam Menganalisis Klaster Kelompok Buruh Harian Penebang Kayu

Perilaku ekonomi buruh harian di Desa Muara Pari secara akurat merefleksikan teori mekanisme survival James C. Scott: di tengah tekanan kapitalisme industri, buruh tidak mengejar

akumulasi laba, melainkan memastikan diri tidak jatuh di bawah garis bahaya kelaparan, sebagaimana tampak pada tiga strategi bertahan hidup berikut.

1) Mengencangkan Sabuk Pengaman (Belt-Tightening): Strategi Penekanan Konsumsi Rumah Tangga

Strategi ini merupakan respons defensif terhadap fluktuasi pendapatan akibat ketimpangan modal finansial dan tingginya biaya hidup akibat keterbatasan infrastruktur. Pendapatan rumah tangga petani pada periode harga normal hanya berkisar Rp2.500.000,00-Rp3.500.000,00 per bulan, jauh di bawah karyawan perusahaan yang mencapai Rp4.000.000,00-Rp10.000.000,00 (data primer penelitian, 2026), dan dapat merosot hingga 0% saat musim penghujan. Tekanan ini diperberat struktur biaya operasional penggesekan kayu (Tabel 3), sehingga dari pendapatan bruto Rp7.600.000,00 per siklus dua kubik kayu ulin hanya menyisakan keuntungan bersih Rp2.775.000,00 untuk risiko kerja yang bertaruh nyawa, kian tertekan oleh anjloknya harga karet di bawah Rp7.000,00 per kg serta mahalnnya biaya logistik, yang turut mengerek harga beras menjadi Rp70.000,00-Rp140.000,00 per 5 kg. Penghematan dilakukan dengan membatasi belanja non-primer, memanfaatkan pangan hutan gratis, menunda perbaikan rumah, dan menggunakan air sungai langsung meski berisiko kesehatan, setelah unit air bersih BUMDes berhenti beroperasi. Pengetatan berlangsung berjenjang: kebutuhan tersier dan sekunder dipangkas lebih dulu, baru kualitas pangan ditekan sebagai keterampilan bertahan hidup yang dijalankan sadar dan terukur, sebagaimana dituturkan salah seorang informan berikut.

"Kalau sudah musim hujan, kayu tidak bisa keluar, karet juga tidak bisa disadap. Jadi, mau tidak mau kami harus mengurangi biaya pengeluaran. Beli baju ditunda, rokok dikurangi, lauk cukup ikan dari sungai saja. Yang penting anak-anak masih bisa makan dan sekolah, soal lain bisa nanti." (Wawancara dengan Bapak S, buruh penebang kayu, 47 tahun, Februari 2026)

Langkah-langkah pengetatan tersebut memperlihatkan urutan prioritas kebutuhan yang jelas dan bukan tindakan panik yang acak: rumah tangga terlebih dahulu menahan diri dari kebutuhan tersier (pakaian baru, rokok), kemudian kebutuhan sekunder (perbaikan rumah, layanan air bersih berbayar), dan baru pada tahap akhir menyentuh kualitas pangan itu sendiri. Urutan berjenjang ini menjadi bukti empiris atas argumen Scott bahwa petani miskin memiliki kalkulasi rasional untuk menjaga stabilitas konsumsi minimum (*subsistence floor*) selama mungkin, alih-alih memaksimalkan pendapatan dengan mengorbankan margin keamanan hidupnya. Dampak dari strategi ini bersifat ganda: di satu sisi mampu menahan laju kejatuhan rumah tangga ke bawah garis kelaparan pada musim paceklik, namun di sisi lain menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang (konsumsi air sungai tanpa pengolahan) dan risiko sosial berupa tertundanya mobilitas (perbaikan rumah, pendidikan lanjutan) yang pada gilirannya mereproduksi kerentanan struktural rumah tangga buruh dari satu musim ke musim berikutnya.

2) Alternatif Subsistensi (Subsistence Alternatives): Diversifikasi Mata Pencarian

Sebagai bentuk strategi "mendahulukan selamat", buruh di Muara Pari tidak pernah bergantung pada satu sumber penghasilan saja, sebuah keharusan mengingat modal alam yang mengelilingi desa sesungguhnya melimpah secara fisik namun sangat terbatas secara akses akibat padatnya konsesi tambang, migas, kayu, dan eks-perkebunan yang melingkari desa (Tabel 2). Di tengah keterbatasan tersebut, diversifikasi sumber pendapatan berlangsung sangat cair mengikuti ritme waktu:

- Pagi hari warga tetap menyadap karet meski harga rendah, sekaligus mengambil rotan ke hutan (sebagai tabungan pangan).
- Siang hari bekerja sebagai penebang kayu (untuk uang tunai harian).
- Malam hari memasang jaring atau pancing di Sungai Lahei untuk lauk-pauk.
- Ibu rumah tangga seringkali membantu dengan mencari rotan atau bekerja di ladang padi gunung.

Mengambil kayu di hutan merupakan aktivitas paling dominan bagi buruh harian Muara Pari karena hasil penjualannya jauh lebih menjanjikan dibanding menyadap karet ketika harga anjlok di bawah Rp7.000,00 per kg, sehingga kondisi ini akhirnya menciptakan fenomena "lahan tidur" (data primer penelitian, 2026). Pekerjaan ini menuntut buruh bermalam di hutan tiga hingga tujuh hari, sehingga mereka kerap berhutang lebih dulu kepada warung maupun pengepul, yang memperlihatkan eratnya keterkaitan diversifikasi nafkah dengan relasi patron-klien. Temuan lapangan juga mengungkapkan pola kerja kolektif berbasis gender, dimana para buruh membentuk kelompok tiga hingga enam orang, kemudian istri turut mendampingi suami laki-laki menebang dan juga memenuhi kebutuhan pangan kelompok selama di hutan. Diversifikasi ini mengikuti ritme waktu dan musim yang dipahami secara turun-temurun, yang berfungsi sebagai jaring pengaman mandiri yang menyebarkan risiko kegagalan ekonomi, sebagaimana dituturkan salah seorang informan berikut.

"Di sini tidak bisa mengandalkan satu pekerjaan saja, pasti lapar. Pagi saya nyadap karet, siang ikut nebang kayu, kalau malam pasang jaring di sungai buat lauk. Kalau harga karet jatuh, masih ada hasil kayu. Kalau kayu lagi susah, masih ada ikan. Jadi tidak pernah benar-benar kosong." (Wawancara dengan Bapak R, buruh penebang kayu sekaligus penyadap karet, 39 tahun, Februari 2026.

Strategi ini turut diperluas melalui migrasi ekonomi sirkuler pemuda desa pergi ke Ibu Kota Kabupaten, yaitu Muara Teweh, atau menjadi buruh kontrak tambang, namun tetap menjadikan desa asal sebagai tempat tinggal utama dengan remitansi via Agen BRILink menjadi suplemen ketahanan ekonomi keluarga untuk biaya pendidikan, pengobatan, hingga modal membuka ladang. Kebijakan Pemerintah Desa yang mengizinkan warga membuka ladang padi gunung di lahan eks-perkebunan karet yang tidak terkelola turut memperluas ruang alternatif subsistensi secara kolektif, sebagaimana dituturkan salah seorang perangkat desa berikut.

"Lahan warga makin sempit, sementara kebun karet bekas itu banyak yang dibiarkan terlantar. Daripada menganggur, kami dari desa mengizinkan wargaenggarapnya untuk berladang padi. Setidaknya kalau mereka punya beras sendiri, tidak terlalu bergantung pada harga di pasar. Itu cara kami menjaga warga tetap bisa makan." (Wawancara dengan Bapak H, perangkat Desa Muara Pari, Februari 2026)

Diversifikasi nafkah ganda ini pada dasarnya melibatkan berbagai pihak sekaligus: rumah tangga inti (suami-istri dan anak sebagai satu kesatuan unit kerja), kelompok kerja kolektif berbasis kekerabatan dan ketetanggaan, pengepul sebagai penyedia modal awal, serta Pemerintah Desa sebagai pihak yang membuka ruang legal atas lahan eks-perkebunan. Selain sumber nafkah dari hasil hutan, sungai, dan ladang yang telah diuraikan, buruh rumah tangga di Muara Pari juga menjaga ternak peliharaan berskala kecil, terutama ayam kampung dan, pada sebagian rumah tangga, itik serta babi, yang dipelihara secara ekstensif di pekarangan tanpa membutuhkan biaya pakan besar. Ternak ini berfungsi ganda: sebagai sumber protein cadangan yang dapat langsung dikonsumsi saat hasil sungai atau hutan sedang minim, sekaligus sebagai "tabungan hidup" yang sewaktu-waktu dapat dijual atau dipotong untuk menutup kebutuhan mendesak seperti biaya berobat atau hajatan, sebuah bentuk aset likuid yang setara fungsinya dengan tabungan emas dalam strategi jaringan sosial. Dengan demikian, kombinasi antara penyadapan karet, penebangan kayu, perikanan sungai, perladangan, migrasi sirkuler, dan pemeliharaan ternak skala kecil menunjukkan bahwa nafkah ganda (*multiple livelihood*) bukan sekadar sampingan, melainkan arsitektur ekonomi utuh yang sengaja dirawat buruh Muara Pari untuk menyebar risiko pada berbagai sumber sekaligus. Dampak dari pola ini adalah ketahanan pangan rumah tangga yang relatif terjaga meski pendapatan tunai berfluktuasi tajam, meskipun pada saat yang sama waktu kerja buruh menjadi sangat panjang dan lintas sektor, sehingga jarang tersisa ruang istirahat maupun waktu untuk aktivitas produktif jangka panjang seperti mengembangkan usaha di luar subsistensi.

3) Pemanfaatan Jaringan Sosial (Social Networking): Modal Sosial sebagai Instrumen Bertahan Hidup

Mekanisme survival di desa ini sangat bergantung pada resiprositas, prinsip saling memberi dan menerima bantuan timbal balik layaknya sistem asuransi komunitas. Masyarakat memanfaatkan jaringan sosial untuk hutang-piutang tanpa bunga, termasuk tradisi Handep yang dibalas dengan tenaga setara, serta bagi hasil sadapan karet 3:2 yang menguntungkan pekerja. Perselisihan ditopang lembaga adat (Mantir dan Demang) melalui prinsip Belom Bahadat dan sanksi Singer, lebih dipercaya warga dibanding jalur hukum formal. Relasi patron-klien penebang-pengepul menjadi katup pengaman vertikal: pengepul memberikan pinjaman modal atau beras di muka saat paceklik, dengan konsekuensi hasil sadapan wajib dijual di bawah harga pasar melalui sistem ijon. Ketahanan finansial ini juga terlihat dari tabungan emas dan ternak ayam, serta BLT Dana Desa Rp300.000,00 per bulan,

PKH, BPNT, dan subsidi pupuk. Meski sering dianggap eksploitatif dalam kacamata ekonomi formal, secara moral pengepul adalah "penolong" yang dibalas loyalitas penjualan hasil, sehingga hubungan ini dipersepsikan adil secara moral meski timpang secara ekonomi (Scott, 1976), sebagaimana tercermin dalam penuturan salah seorang informan berikut.

"Orang bilang pengepul itu mengambil untung dari kami. Tapi waktu anak saya sakit dan dapur tidak ada beras, siapa yang kasih pinjam cepat tanpa surat-surat? Ya beliau. Harga memang dipotong, tapi kalau tidak ada beliau, kami mau pinjam ke mana? Bagi kami, beliau itu penolong di saat susah." (Wawancara dengan Ibu M, istri buruh penebang kayu, 43 tahun, Februari 2026)

Pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan sosial ini berlapis, mulai dari sesama warga dalam ikatan Handep, lembaga adat Mantir dan Demang sebagai otoritas moral penyelesai sengketa, pengepul sebagai patron ekonomi, hingga negara melalui skema bantuan sosial (BLT Dana Desa, PKH, BPNT, subsidi pupuk) yang berfungsi sebagai jaring pengaman formal pelengkap jaring pengaman informal. Keseluruhan jaringan ini bekerja bukan berdasarkan logika untung-rugi semata, melainkan berdasarkan apa yang oleh Scott (1976) disebut sebagai "ekonomi moral petani" (*moral economy of the peasant*), dimana sebuah tatanan norma bersama yang menempatkan kewajiban tolong-menolong dan jaminan subsistensi minimum di atas kalkulasi laba individual. Kesetiaan buruh kepada pengepul meski harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasar, misalnya, bukan semata bentuk keterjebakan ekonomi, melainkan juga wujud resiprositas moral atas pertolongan yang diberikan pengepul di masa sulit, hal tersebut merupakan sebuah pola relasi yang oleh Scott (1976) dipahami sebagai mekanisme redistribusi risiko dalam masyarakat agraris pra-kapitalis yang tetap bertahan di tengah penetrasi ekonomi pasar.

Berdasarkan ketiga strategi survival yang dilakukan para buruh harian penebang kayu di Desa Muara Pari tersebut, tentunya tidak berdiri secara sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara dialektis dan saling menopang satu sama lain sebagai satu kesatuan sistem pertahanan hidup. Pengencangan sabuk pengaman berperan sebagai lini pertahanan pertama yang menahan laju penurunan konsumsi ketika pendapatan seret; alternatif subsistensi melalui nafkah ganda dan pemeliharaan ternak skala kecil menjadi lini kedua yang menyediakan sumber pangan dan pendapatan cadangan dari berbagai sektor sekaligus; sedangkan pemanfaatan jaringan sosial menjadi lini ketiga yang menjamin akses terhadap modal, pangan, dan penyelesaian konflik ketika kedua lini sebelumnya tidak lagi mencukupi. Kesesuaian temuan lapangan dengan pemikiran James C. Scott tampak jelas pada tiga aspek: pertama, pada prinsip "selamat lebih dahulu" (*safety first*) yang menjelaskan mengapa buruh Muara Pari lebih memilih menyebar risiko lewat diversifikasi dan menjaga hubungan patron-klien daripada mengejar keuntungan maksimal dari satu sumber usaha; kedua, pada konsep subsistence ethic yang menjelaskan urutan berjenjang dalam strategi pengetatan konsumsi, di mana kebutuhan pangan minimum

senantiasa menjadi batas yang dipertahankan paling akhir; dan ketiga, pada konsep *moral economy* yang menjelaskan mengapa relasi yang secara ekonomi timpang (seperti sistem ijon dengan pengepul) tetap dipertahankan dan bahkan dipersepsikan adil oleh warga, karena relasi tersebut menyediakan jaminan subsistensi yang tidak dapat diperoleh dari pasar bebas maupun negara secara memadai. Secara keseluruhan, kondisi keterbatasan modal, sempitnya akses lahan, dan fluktuasi harga komoditas telah mendorong buruh harian Muara Pari mengembangkan langkah-langkah bertahan hidup yang terukur dan berlapis, sebuah bukti empiris bahwa di tengah tekanan ekonomi pasar dan industri ekstraktif, logika subsistensi ala petani yang digagas Scott masih relevan menjelaskan rasionalitas ekonomi masyarakat pedesaan hari ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan yang diajukan di awal, yaitu memetakan mekanisme survival buruh harian penebang kayu di Desa Muara Pari, dengan menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi buruh bukan bersumber dari ketiadaan sumber daya alam, melainkan dari paradoks geografis: kekayaan hutan dan lahan yang melimpah di sekitar desa terkunci dalam konsesi tambang, migas, kayu, dan eks-perkebunan berskala besar, sehingga tidak serta-merta terkonversi menjadi kesejahteraan warga, kondisi yang kian diperberat oleh fluktuasi harga karet dan tingginya biaya logistik akibat buruknya akses jalan. Menjawab tujuan tersebut, temuan penelitian mengonfirmasi relevansi prinsip *safety first* Scott (1976): buruh secara sadar memilih jalur aman berlapis, mulai dari penekanan konsumsi, diversifikasi nafkah, hingga penguatan jaringan sosial melalui tradisi Handep dan relasi patron-klien, ketimbang mengejar keuntungan maksimal berisiko tinggi, dengan modal sosial dan kebijakan lokal desa sebagai penopang utama yang menahan mereka tetap di atas ambang batas subsistensi. Lebih jauh, temuan ini memperlihatkan bahwa logika ekonomi moral petani yang digagas Scott tidak sekadar bertahan, tetapi juga beradaptasi pada konteks baru, yaitu kelompok buruh penebang kayu yang lahir dari kegagalan sektor agraria akibat ekspansi industri ekstraktif, kelompok pekerja yang selama ini belum banyak disentuh literatur survival pedesaan, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi empiris sekaligus memperluas cakupan teoretis kerangka survival Scott pada konteks prekariat ekonomi ekstraktif kontemporer.

Merujuk pada temuan tersebut, sejumlah langkah lanjutan disarankan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, disarankan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan akses 17 km serta memperketat pengawasan tumpang tindih izin konsesi tambang dan perkebunan guna mencegah eskalasi konflik lahan; dukungan ini sekaligus mempercepat proses pengakuan hukum atas usulan Hutan Adat Temenggung Sujur Hungei Parau Leu Muara Pari, sebuah perjuangan yang telah diajukan sejak 2012 dan hingga kini masih terus

berlangsung tanpa kepastian. Bagi Pemerintah Desa Muara Pari, perlu revitalisasi manajemen BUMDes dan optimalisasi Koperasi Merah Putih untuk memutus ketergantungan buruh terhadap skema ijon, disertai formalisasi kebijakan akses lahan eks-perkebunan karet dan peningkatan transparansi pengelolaan Dana Desa. Bagi perusahaan sekitar desa, diharapkan program pemberdayaan yang memperkuat modal manusia warga, pelatihan keterampilan teknis, serta CSR bagi layanan kesehatan, air bersih, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu berkelanjutan. Bagi penelitian mendatang, disarankan mengkaji dampak jangka panjang ekspansi industri ekstraktif terhadap transformasi budaya Dayak Taboyan, termasuk dimensi gender dalam mekanisme survival yang belum banyak terungkap dalam penelitian ini, serta penelitian kuantitatif lanjutan untuk mengukur kontribusi masing-masing strategi survival di wilayah lain berkarakteristik serupa, sejalan dengan proses pemetaan wilayah adat dan advokasi legalisasi hutan adat di Kalimantan Tengah yang saat ini masih terus berjalan dan dapat menjadi konteks lanjutan bagi riset serupa.

REFERENSI

- Afridania, Y., Elvawati, E., & Rahmadani, S. (2022). Strategi Bertahan Hidup Buruh Nelayan Tradisional Pada Musim Paceklik. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 776. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.57583>
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.
- BPS Kabupaten Barito Utara. (2024). *Kecamatan Lahei Dalam Angka 2024* (memuat data Desa Muara Pari). Muara Teweh: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Barito Utara. (2025). *Kecamatan Lahei Dalam Angka 2025*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2025*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century* (IDS Discussion Paper 296). Brighton: Institute of Development Studies.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- DFID. (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: Department for International Development.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). Perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses dari <https://id.scribd.com/document/719900474/1-PBPH-Juli-2023-Kalimantan-Tengah>
- Febrianti, P. A., Fitriyah, R., & Arifiyanti, J. (2024). Mekanisme Survival Petani Buah Naga di Dusun Rejoagung, Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Sosial Terapan*, 2(1), 41-47. <https://doi.org/10.29244/jstrsv.2.1.41-47>
- Kusuma, A., Jazzyra, X. R., Maulida, P. N., Alghifary, M. R. F., & Wijaya, A. S. (2025). Modal Sosial Asli vs Modal Sosial Bentukan: Kegagalan Institusi PHBM dalam Menggerakkan Sistem Nafkah Pedesaan. *Karimah Tauhid*, 4(7), 4856-4863. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.18879>
- Nur Adhi, R., AT, M. R., & Muhammad, S. (2023). Pekerja Prekariat dan Implikasi atas Fleksibilitas Kerja di Kawasan Industri Kota Makassar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 141-150. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2423>
- Pemerintah Desa Muara Pari. (2026). *Laporan Identifikasi Penghidupan dan Profil Desa Muara Pari*.

- (Dokumen Internal).
- Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2026*. Muara Teweh.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Purwanto, R. D., & Mahadika, A. (2021). Deforestation and Changes in People's Economies Due to Oil Palm Plantations in East Kalimantan. *Populika*, 9(2), 23-34. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.364>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis* (IDS Working Paper 72). Brighton: Institute of Development Studies.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.
- Susanti, A., & Izana, N. N. (2021). Diversifikasi Nafkah di Pedesaan dalam Konteks Relasi Desa-Kota. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 53-65. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1722.2021>
- Wolf, E. R. (1966). *Peasants*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.